

2024

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB



(0532) 21014



pangkalanbunpn@gmail.com



Jalan Sutan Syahrir No. 16 Pangkalan Bun 74111
Kab. Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah



www.pn-pangkalanbun.go.id



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024



**PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN**



KATA PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Kegiatan (LPK) Tahun 2024 merupakan bentuk uraian pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024, meliputi bidang teknis dan non teknis, pengawasan internal, pembinaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan serta pengelolaan teknologi informasi. Disusun berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024. Selain memberikan informasi perihal pelaksanaan kinerja, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 juga sebagai bahan evaluasi dan perencanaan di masa mendatang agar kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjadi lebih baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

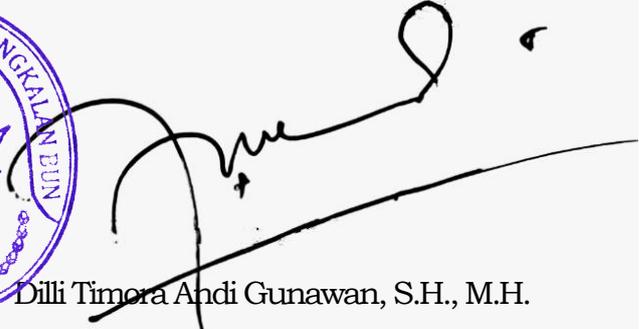
Laporan ini disusun secara optimal dan sesuai dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Apabila masih ditemukan hambatan dalam penyelesaiannya, maka akan diperbaiki dalam proses evaluasi berlanjut supaya dapat meningkatkan prestasi kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara berjenjang kepada Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya serta diharapkan bisa bermanfaat bagi kalangan internal maupun masyarakat.

Pangkalan Bun, 20 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun




Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

NIP. 197603172001121002

PROFIL KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA, DAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN



Nama : Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.
NIP : 197603172001121002
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 17 Maret 1976
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Pangkat/Golongan : Hakim Madya Muda (IV/b)



Nama : Ikha Tina, S.H., M.Hum.
NIP : 197701272001122002
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 27 Januari 1977
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Pangkat/Golongan : Hakim Madya Muda (IV/c)



Nama : Erick Ignatius Christoffel, S.H.
NIP : 198008052009041005
Tempat Tanggal Lahir : Minahasa, 05 Agustus 1980
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Pangkat/Golongan : Hakim Pratama Utama (III/d)



Nama : Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.
NIP : 198809272011011005
Tempat Tanggal Lahir : Denpasar, 27 September 1988
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Pangkat/Golongan : Hakim Pratama Utama (III/d)



Nama : Firmansyah, S.H., M.H.
NIP : 198904142011011004
Tempat Tanggal Lahir : Barru, 14 April 1989
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Pangkat/Golongan : Hakim Pratama Utama (III/d)



Nama : Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.
NIP : 199002202017121006
Tempat Tanggal Lahir : Sanggau, 20 Februari 1990
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Pangkat/Golongan : Hakim Pratama Muda (III/b)



Nama : Harly Marllyn Simanjuntak, S.H.
NIP : 19761001 200112 1 002
Tempat Tanggal Lahir : Kapuas, 01 Oktober 1976
Jabatan : Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)



Nama : Husni Thamrin, S.T.
NIP : 197803082009041003
Tempat Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 08 Maret 1978
Jabatan : Sekretaris Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TAHUN 2024



Pada tanggal 30 Mei 2024, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan pencapaian Nilai Sempurna IKPA pada Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah



Pada tanggal 30 Mei 2024, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan pencapaian Nilai Sempurna IKPA pada Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Periode Triwulan I Tahun Anggaran 2024 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah



Pada tanggal 18 Juli 2024, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan pencapaian Nilai Sempurna IKPA pada Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Periode Semester I Tahun Anggaran 2024



Pada tanggal 18 Juli 2024, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan pencapaian Nilai Sempurna IKPA pada Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Periode Semester I Tahun Anggaran 2024



Pada tanggal 18 Oktober 2024, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan pencapaian Nilai Sempurna IKPA pada Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2024 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah



Pada tanggal 18 Oktober 2024, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan pencapaian Nilai Sempurna IKPA pada Kategori Pagu Kecil Bobot Kecil Periode Triwulan III Tahun Anggaran 2024 Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah



Pada tanggal 02 Desember 2024, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan Piagam Penghargaan Sebagai Terbaik Vii-Penilaian Layanan Hukum Kategori Pos Bantuan Hukum



Piagam Penghargaan dari Pengadilan Tinggi Palangkarata kepada
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Profil Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris	iii
Piagam dan Penghargaan.....	vii
Daftar Isi	xiii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara, dan Capaian Prioritas Nasional ...	6
A. Keadaan Perkara	7
• Keadaan Perkara Tingkat Pertama	7
• Keadaan Perkara Tingkat Banding	15
• Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	15
• Keadaan Perkara Peninjauan Kembali	15
B. Penyelesaian Perkara	15
• Jumlah Sisa Perkara yang diputus	15
• Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu	16
• Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya banding, Kasasi, dan PK	16
• Jumlah Perkara Perdata yang berhasil melalui mediasi	17
• Jumlah Perkara Anak yang berhasil melalui diversi	17
C. Capaian Prioritas Nasional	
• Pos Bantuan Hukum	17
• Sidang Keliling	18
• Prodeo	20



Bab III

SDM, Komposisi SDM berdasarkan Kepangkatan, Golongan/Pendidikan 21

- A. Mutasi 26
- B. Promosi 26
- C. Pensiun 26
- D. Diklat 27

Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana Prasarana, dan Teknologi Informasi..... 32

- A. Pengelolaan Keuangan 33
- B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 33
- C. Pengelolaan Teknologi Informasi 45

Bab V Peningkatan Pelayanan Publik..... 51

- A. Pembangunan Zona Integritas 52
- B. Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH)..... 53
- C. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 54
- D. Inovasi Pelayanan Publik 56

Bab VI Pengawasan..... 69

- A. Internal 70
- B. Evaluasi 72

Bab VII Penutup..... 73

- A. Kesimpulan 74
- B. Rekomendasi 74



BAB I PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Peradilan di Indonesia memasuki era reformasi yang berbasis teknologi serta dituntut untuk lebih transparan dan professional dibidang hukum, dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang. Perbaikan tersebut diharapkan dapat membuat lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dimata masyarakat umum tidak lagi menakutkan, akan tetapi menjadi pelindung dan pengayom masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sesuai dengan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 diperlukan usaha untuk mewujudkan sebuah Badan Peradilan yang Agung dengan:

1. Melaksanakan fungsi kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.

Selain hal diatas sesuai dengan arah dan kebijakan Mahkamah Agung RI dalam Agenda Pembaruannya, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berfokus pada pelayanan publik yang prima kepada masyarakat pencari keadilan dalam bentuk :

1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yakni pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.
2. Pelaksanaan Pelayanan PTSP Online yakni layanan PTSP secara online berbasis *video conference* via *whatsapp* sehingga dapat diakses oleh masyarakat dari mana saja.
3. Penerapan aplikasi *e-Court* dengan fitur *e-filing* (pendaftaran perkara secara elektronik), *e-payment* (pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik), *e-summons* (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik). Melalui aplikasi *e-Court* pendaftar gugatan permohonan dari seorang advokat saja tanpa harus datang ke pengadilan. Penerapan Elektronik juga dilakukan secara menyeluruh terhadap tahapan persidangan yakni melalui *e-Litigasi*. Sistem *e-Litigasi* memwadahi pelaksanaan proses persidangan secara elektronik yang memuat dokumen persidangan (gugatan, permohonan, persetujuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan), pembuktian dan pengucapan putusan dilaksanakan secara elektronik.
4. Program Akreditasi Penjaminan Mutu telah dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sampai dengan Oktober 2023. Selanjutnya, mengikuti program lanjutan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Akreditasi tersebut dirumuskan menjadi Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada bulan November 2023.
5. Sebagai upaya peningkatan kualitas Pelayanan publik, pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempertahankan perolehan Pembangunan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi yang telah diperoleh pada tahun 2021.

B. Visi dan Misi

a. Visi

Dengan tetap menyelaraskan pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**” maka ditetapkan visi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB sebagaimana yaitu “**Terwujudnya Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Yang Agung**”.

b. Misi

Untuk mencapai misi tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan .
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

c. Rencana Strategis

Untuk memperjelas arah tujuan yang ingin dicapai maka tujuan merupakan implementasi dari misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2020-2024, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB merumuskan Rencana Strategis :

1. Peningkatan Pelayanan dan Transparansi Badan Peradilan.
2. Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara.
3. Peningkatan Akses Peradilan.
4. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

Berdasarkan tujuan diatas maka sasaran yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun antara lain :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel.
2. Terciptanya Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Terciptanya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.



4. Terciptanya Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.
5. Terwujudnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
6. Terwujudnya Transparansi Pengelolaan SDM Lembaga Peradilan berdasarkan parameter objektif.
7. Terciptanya Peningkatan Pengelolaan Manajerial Lembaga Peradilan secara Akuntabel, Efektif, dan Efisien.



BAB II

KEADAAN PERKARA, PENYELESAIAN PERKARA, DAN CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

BAB II

Keadaan Perkara, Penyelesaian Perkara, dan Capaian Prioritas Nasional

A. Keadaan Perkara

1. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan salah satu Pengadilan Negeri Pertama dibawah Lingkungan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang berwenang mengadili perkara tingkat pertama di Wilayah Kalimantan Tengah. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengadili perkara pidana, pidana anak, dan perkara perdata. Selama tahun 2024 perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebanyak 664 perkara yang terdiri dari perkara pidana sebanyak 476 perkara atau 71,68% termasuk dengan pidana cepat dan pidana anak, perdata sebanyak 188 perkara atau 28,31% dari total perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun selama tahun 2024.

a) Matriks Perkara Perdata Gugatan Tahun 2024

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	24	3	2	25
2	Februari	25	5	7	23
3	Maret	23	3	3	23
4	April	23	7	4	26
5	Mei	26	6	4	28
6	Juni	28	6	9	25
7	Juli	25	3	8	20
8	Agustus	20	6	9	17
9	September	17	3	5	15
10	Oktober	15	4	3	16
11	November	16	5	1	20
12	Desember	20	4	2	22
JUMLAH			55	57	22

(Sumber : SIPPN Pangkalan Bun)

Keterangan Perkara Gugatan

Sisa Tahun 2023 : 24

Masuk Tahun 2024 : 55

Minutasi Tahun 2024 : 57

Sisa Belum Minutasi : 22

b) Matriks Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2024

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	3	-	3	-
2	Februari	-	1	-	1
3	Maret	1	-	1	-
4	April	-	3	-	-
5	Mei	3	-	-	3
6	Juni	3	1	3	1
7	Juli	1	5	3	3
8	Agustus	3	7	3	7
9	September	7	5	8	4
10	Oktober	4	1	3	2
11	November	2	1	1	2
12	Desember	2	1	2	1
JUMLAH			25	27	1

(Sumber : SIPP PN Pangkalan Bun)

Keterangan Perkara Gugatan Sederhana

Sisa Tahun 2023 : 3

Masuk Tahun 2024 : 25

Minutasi Tahun 2024 : 27

Sisa Belum Minutasi : 1

c) Matriks Perkara Perdata Permohonan Tahun 2024

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	2	11	9	4
2	Februari	4	6	8	2

3	Maret	2	8	10	-
4	April	-	3	-	3
5	Mei	3	5	6	2
6	Juni	2	13	13	2
7	Juli	2	6	4	4
8	Agustus	4	10	14	-
9	September	-	3	2	1
10	Oktober	1	7	2	6
11	November	6	16	17	5
12	Desember	5	14	15	4
JUMLAH			102	100	4

(Sumber : SIPP PN Pangkalan Bun)

Keterangan Perkara Perdata Permohonan

Sisa Tahun 2023 : 2

Masuk Tahun 2024 : 102

Minutasi Tahun 2024 : 100

Sisa Belum Minutasi : 4

d) Matriks Perkara Perdata Perlawanan/Bantahan Tahun 2024

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	1	-	-	1
2	Februari	1	-	1	-
3	Maret	-	1	-	-
4	April	1	-	-	1
5	Mei	1	-	-	1
6	Juni	1	-	1	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	1	-	1
11	November	1	-	-	1
12	Desember	1	1	1	2
JUMLAH			3	3	2

(Sumber : SIPP PN Pangkalan Bun)

Keterangan Perkara Perdata Perlawanan

Sisa Tahun 2023	: 1
Masuk Tahun 2024	: 3
Minutasi Tahun 2024	: 3
Sisa Belum Minutasi	: 2

e) Matriks Perkara Perdata Permohonan/Konsinyasi Tahun 2024

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	1	1	-
12	Desember	-	-	-	-
JUMLAH			1	1	-

(Sumber : SIPP PN Pangkalan Bun)

Keterangan Perkara Perdata Konsinyasi

Sisa Tahun 2023	: 0
Masuk Tahun 2024	: 1
Minutasi Tahun 2024	: 1
Sisa Belum Minutasi	: 0

f) Matriks Perkara Pidana Biasa Tahun 2024

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
----	-------	--------------------	-------	----------	------

1	Januari	58	31	50	39
2	Februari	39	33	23	49
3	Maret	49	52	31	70
4	April	70	30	39	61
5	Mei	61	41	34	68
6	Juni	68	32	54	46
7	Juli	46	33	32	47
8	Agustus	47	40	23	64
9	September	64	44	45	63
10	Oktober	63	31	27	67
11	November	67	30	43	54
12	Desember	54	25	40	39
JUMLAH			422	441	39

(Sumber : SIPP PN Pangkalan Bun)

Keterangan Perkara Pidana Biasa

Sisa Tahun 2023 : 58

Masuk Tahun 2024 : 422

Minutasi Tahun 2024 : 441

Sisa Belum Minutasi : 39

g) Matriks Perkara Pidana Singkat Tahun 2024

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-



JUMLAH	0	0	0
---------------	---	---	---

(Sumber : SIPP PN Pangkalan Bun)

Keterangan Perkara Pidana Singkat

Sisa Tahun 2023 : 0

Masuk Tahun 2024 : 0

Minutasi Tahun 2024 : 0

Sisa Belum Minutasi : 0

h) Matriks Perkara Pidana Cepat Tahun 2024

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	-	2	2	-
2	Februari	-	2	2	-
3	Maret	-	2	2	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	2	2	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	1	1	-
9	September	-	7	7	-
10	Oktober	-	1	1	-
11	November	-	3	3	-
12	Desember	-	-	-	-
JUMLAH			20	20	-

(Sumber : SIPP PN Pangkalan Bun)

Keterangan Perkara Pidana Cepat

Sisa Tahun 2023 : 0

Masuk Tahun 2024 : 20

Minutasi Tahun 2023 : 20

Sisa Belum Mutasi : 0

i) Matriks Perkara Praperadilan Tahun 2024

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	-	1	-	1
2	Februari	-	-	1	-
3	Maret	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-
8	Agustus	-	-	-	-
9	September	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-
JUMLAH			1	1	0

(Sumber : SIPP PN Pangkalan Bun)

Keterangan Perkara Praperadilan

Sisa Tahun 2023 : 0

Masuk Tahun 2024 : 1

Minutasi Tahun 2024 : 1

Sisa Belum Minutasi : 0

j) Matriks Perkara Pidana Anak Tahun 2024

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	-	-	-	-
2	Februari	-	1	1	-
3	Maret	-	1	-	1
4	April	1	2	1	2
5	Mei	2	1	1	2
6	Juni	2	2	3	1
7	Juli	1	1	-	2
8	Agustus	2	2	2	2
9	September	2	-	2	-

10	Oktober	-	2	1	1
11	November	1	2	3	-
12	Desember	-	1	-	1
JUMLAH			15	14	1

(Sumber : SIPP PN Pangkalan Bun)

Keterangan Perkara Pidana Anak

Sisa Tahun 2023 : 0

Masuk Tahun 2024 : 15

Minutasi Tahun 2024 : 14

Sisa Belum Minutasi : 1

k) Matriks Perkara Pidana Lalu-Lintas Tahun 2024

NO	BULAN	SISA BULAN LALU	MASUK	MINUTASI	SISA
1	Januari	-	290	290	-
2	Februari	-	191	191	-
3	Maret	-	144	144	-
4	April	-	148	148	-
5	Mei	-	122	122	-
6	Juni	-	238	238	-
7	Juli	-	206	206	-
8	Agustus	-	314	314	-
9	September	-	308	308	-
10	Oktober	-	68	68	-
11	November	-	638	638	-
12	Desember	-	189	189	-
JUMLAH			2856	2856	0

(Sumber : SIPP PN Pangkalan Bun)

Keterangan Perkara Pidana Lalu-Lintas

Sisa Tahun 2023 : 0

Masuk Tahun 2024 : 2856

Minutasi Tahun 2023 : 2856

Sisa Belum Minutasi : 0

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

NO	PERKARA	PERMOHONAN BANDING	PENGIRIMAN BERKAS	PUTUSAN PT	BELUM PUTUSAN PT
1	Perdata	12	12	16	0
2	Pidana	75	71	61	16
3	Pidana Anak	2	2	2	0

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

NO	PERKARA	PERMOHONAN KASASI	PENGIRIMAN BERKAS	PUTUSAN MA	BELUM PUTUSAN MA
1	Perdata	13	11	14	8
2	Pidana	41	34	34	23
3	Pidana Anak	0	0	0	0

4. Keadaan Perkara Tingkat Peningjauan Kembali

NO	PERKARA	PERMOHONAN PK	PENGIRIMAN BERKAS	PUTUSAN MA	BELUM PUTUSAN MA
1	Gugatan	3	2	1	2
2	Pidana Biasa	1	1	1	1

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang diputus

NO	PERKARA	SISA PERKARA TAHUN LALU (2023)	PUTUS 2024	SISA 2024
1	Perdata Gugatan	24	55	22
2	Perdata Gugatan Sederhana	3	27	1
3	Perdata Permohonan	2	100	2
4	Perdata Permohonan/Bantahan	1	3	2
5	Pidana Biasa	58	441	39
6	Pidana Singkat	0	0	0
7	Pidana Cepat	0	20	0
8	Pidana Anak	0	14	1

2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

NO	PERKARA	SISA TAHUN 2023	MASUK	PUTUS (< 5 BULAN)	PUTUS (> 5 BULAN)
1	Perdata Gugatan	24	55	55	0
2	Perdata Gugatan Sederhana	3	25	25	0
3	Perdata Permohonan	2	102	102	0
4	Perdata Permohonan/Bantahan	1	3	3	0
5	Pidana Biasa	58	422	422	0
6	Pidana Singkat	0	0	0	0
7	Pidana Cepat	0	20	20	0
8	Pidana Anak	0	15	15	0

3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum

a) Keadaan Perkara Tingkat Banding

NO	PERKARA	PUTUSAN PN	BANDING	TIDAK BANDING
1	Perdata	60	12	48
2	Pidana	441	75	366
3	Pidana Anak	15	2	13

b) Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

NO	PERKARA	TURUN MA	KASASI	TIDAK KASASI
1	Perdata	16	13	3
2	Pidana	61	41	20
3	Pidana Anak	0	0	0

c) Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

NO	PERKARA	TURUN MA	PK	TIDAK PK
1	Perdata	14	3	11
2	Pidana	34	1	33
3	Pidana Anak	0	0	0

4. Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

NO	PERKARA	MEDIASI	BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	DALAM PROSES
1	Perkara Gugatan	40	2	0	0

5. Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

NO	PERKARA	JUMLAH PERKARA	JUMLAH YANG DI DIVERSI	BERHASIL	GAGAL
1	Pidana Khusus Anak	3	3	1	2

C. Capaian Prioritas Nasional

1. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan kepada Pemohonan Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan, memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. Advokat Piket adalah Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan pengaturan yang diatur dalam kerjasama kelembangaan Pengadilan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB Tahun 2024 memperoleh anggaran untuk Posbakum sebesar Rp. 44.000.000,- pada DIPA 03. Realisasi Anggaran untuk Posbakum adalah 100% Desember 2024.

Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB dengan Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) **Jems Law Firm**. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberi pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sebagai bagian dari penyelenggaraan bantuan hukum di lingkungan

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang bertanggungjawab, berkualitas dan terkoordinasi demi sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan.

Jadwal Pelayanan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun setiap Senin-Kamis pukul 08.00-12.00 WIB dan 13.00-16.00 WIB serta Jumat pukul 08.00-11.00 WIB dan 13.00-16.00 WIB dengan menempatkan Petugas Pemberi Layanan Hukum di Posbakum atas nama Abdul syukur, S.H. untuk memberikan pelayanan hukum bagi pencari keadilan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Berikut ini jumlah permohonan pelayanan di Posbakum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB Tahun 2024 berjumlah 170 Layanan dengan rincian sebagai berikut :

NO	BULAN	Jumlah Layanan	Jumlah Jaga (Jam)	Keterangan
1	Januari	23	150	
2	Februari	14	123	
3	Maret	10	110	
4	April	10	104	
5	Mei	13	123	
6	Juni	13	122	
7	Juli	16	157	
8	Agustus	14	149	
9	September	19	136	
10	Oktober	17	157	
11	November	12	135	
12	Desember	9	122	

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran mewajibkan setiap pengadilan untuk melakukan pelayanan terpadu sidang keliling. Pelayanan Sidang Keliling adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi dalam satu waktu dan tempat tertentu antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan, dalam

layanan sidang keliling memberikan pelayanan pengesahan perkawinan dan perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan untuk memenuhi pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran. Perkara lainnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri antara lain seperti permohonan pergantian nama, permohonan perbaikan akta kelahiran, dan lain-lain sesuai dengan kewenangan Pengadilan Negeri.

Sidang Keliling adalah sidang Pengadilan Negeri yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan, baik dilaksanakan secara berkala maupun insidental dengan tujuan meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu atau yang sulit menjangkau gedung pengadilan negeri akibat keterbatasan biaya, fisik, maupun secara geografis. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun meliputi 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sendiri terletak di Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga untuk Kabupaten Sukamara tetpaut jarak yang cukup jauh. Demi memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, salah satu sasaran yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah **“Terciptanya Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan”**. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melakukan sidang keliling ke Kabupaten Sukamara.

Adapun sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sidang keliling ini, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai tempat sidang (*zetting plaats*) yaitu di Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara dengan luas 8288 m² dengan Sertifikat Nomor : 300/1987. Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB telah melakukan beberapa kali sidang keliling ke Kabupaten Sukamara, berikut rinciannya :

No	Tanggal Sidang	Lokasi Sidang	Jumlah Perkara	Jumlah Anggaran yang digunakan	Ket
1	05 Maret 2024	Sukamara	6	Rp. 3.960.000	
2	03 Juni 2024	Sukamara	11	Rp. 13.320.000	
3	21 Agustus 2024	Sukamara	6	Rp. 13.200.000	
4	07 November 2024	Sukamara	7	Rp. 7.920.000	
5	12 Desember 2024	Sukamara	6	Rp. 11.580.000	
Jumlah			36	Rp.49.980.000	

3. Perkara Prodeo

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan salah satunya meliputi layanan pembebasan biaya perkara (prodeo). Pembebasan biaya ini diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu. Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah Negara menanggung biaya proses berpekara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berpekara secara cuma-cuma dan dengan begitu dapat meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.

Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan dibebankan pada Negara melalui anggaran Mahkamah Agung R.I. Layanan Pembebasan Biaya Perkara ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan kerja. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Tahun 2024 tidak memperoleh anggaran untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum sehingga tidak ada pelaksanaan pembebasan biaya perkara secara prodeo.



BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SDM BERDASARKAN

KEPANGKATAN/GOLONGAN/ PENDIDIKAN

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/PENDIDIKAN

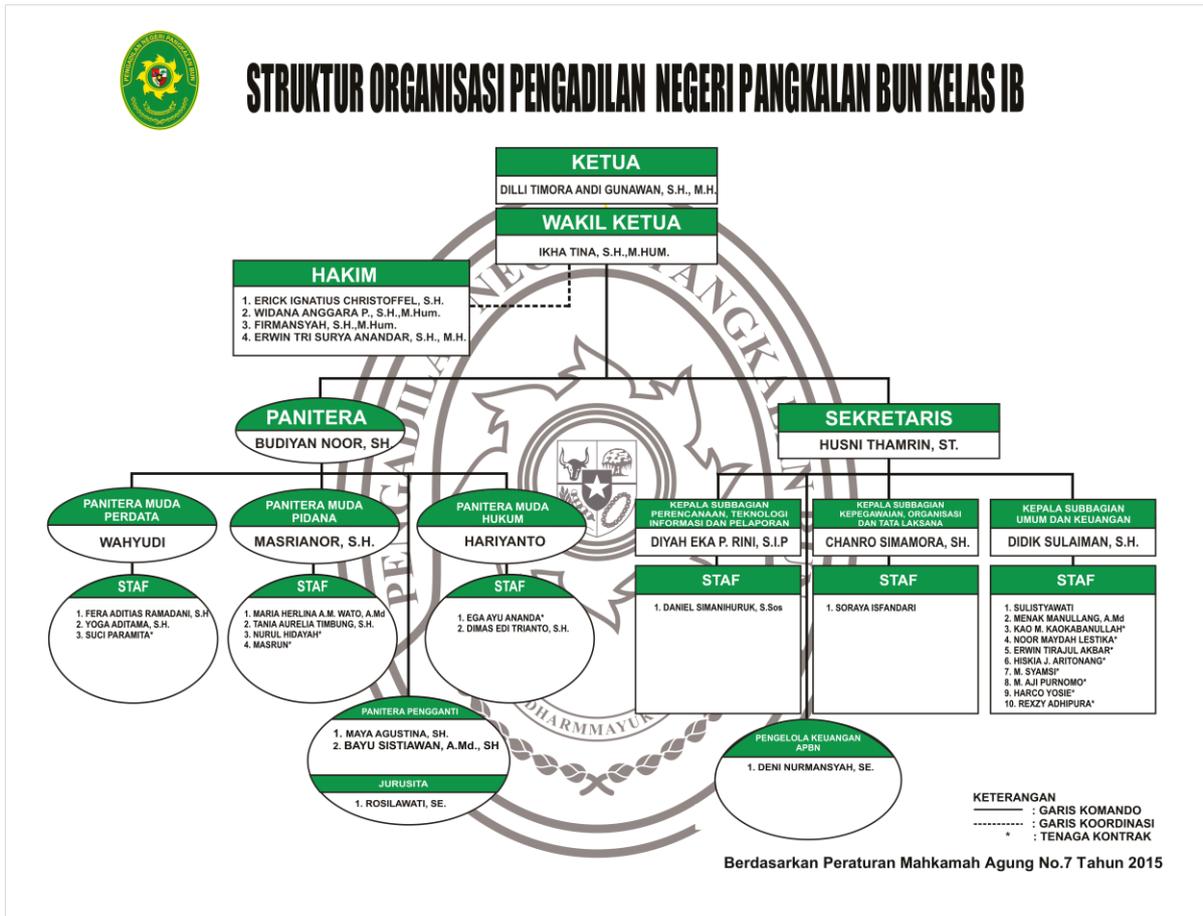
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang menentukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan. Dengan beban kerja yang ada dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah, pendidikan dan kompetensi. Adapun keadaan Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebagai berikut:

1. Keadaan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT
1	Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.	197603172001121002	Ketua Pengadilan	Pembina Tingkat I (IV/b)
2	Ikha Tina, S.H., M.Hum.	197701272001122002	Wakil Ketua Pengadilan	Pembina Muda (IV/c)
3	Erick Ignatius Christoffel, S.H.	198008052009041005	Hakim Pratama Utama	Penata Tingkat I (III/d)
4	Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.	198809272011011005	Hakim Pratama Utama	Penata Tingkat I (III/d)
5	Firmansyah, S.H., M.H.	198904142011011004	Hakim Pratama Utama	Penata Tingkat I (III/d)
6	Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.	199002202017121006	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tingkat I (III/b)
7	Harly Marllyn Simanjuntak, S.H.	197610012001121002	Panitera	Pembina (IV/a)
8	Husni Thamrin, S.T.	197803082009041003	Sekretaris	Pembina (IV/a)
9	Masrianor, S.H.	198310062009121008	Panitera Muda Pidana	Penata Tingkat I (III/d)
10	Hariyanto	197501151994031002	Panitera Muda Hukum	Penata (III/c)
11	Wahyudi, S.H.	197107101993031006	Panitera Muda Perdata	Penata (III/c)
12	Chanro Simamora, S.H.	198904042012121002	Kepala Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Penata (III/d)
13	Didik Sulaiman, S.H.	198110182012121003	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Penata Muda Tingkat I (III/b)
14	Diyah Eka Prasetya Rini, S.I.P.	199405152019032013	Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Penata Muda Tingkat I (III/b)
15	Bayu Sistiawan, A.Md., S.H.	198309232011011004	Panitera Pengganti	Penata Muda Tingkat I (III/b)

16	Maya Agustina, S.H.	198408222014082001	Panitera Pengganti	Penata Muda Tingkat I (III/b)
17	Rosilawati, S.E.	198407192009122002	Jurusita Pengganti	Penata (III/c)
18	Deni Nurmansyah, S.E.	198401012006041005	Analisis Pengelola Keuangan APBN	Penata Tingkat I (III/d)
19	Fera Aditias Ramadani, S.H.	199502122020122010	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Penata Muda Tingkat I (III/b)
20	Maria Herlina Angriyani Moi Wato, A.Md, S.H.	199812172022032010	Klerek-Analis Perkara Peradilan	Penata Muda (III/a)
21	Soraya Isfandari, S.Pd.Sd	198707112009022002	Operator-Penata Layanan Operasional	Penata Muda Tingkat I (III/b)
22	Sulistyawati	198403062014082001	Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan	Pengatur (II/c)
23	Daniel Simanihuruk, S.Sos	199706302022031010	Klerek-Penelaah Teknis Kebijakan	Penata Muda (III/a)
24	Menak Manullang, A.Md	199211132022042001	Klerek-Pengelola Data dan Informasi	Pengatur (II/c)
25	Tania Aurelia Timbung, S.H.	200012072024052001	Klerek-Analis Perkara Peradilan (CPNS)	Penata Muda (III/a)
26	Yoga Aditama, S.H.	199801052024051001	Klerek-Analis Perkara Peradilan (CPNS)	Penata Muda (III/a)
27	Dimas Edi Trianto, S.H.	199906212024051001	Klerek-Analis Perkara Peradilan (CPNS)	Penata Muda (III/a)
28	Hiskia J. Aritonang	-	PPNPN	-
29	Kao M. Kaokabanullah	-	PPNPN	-
30	Noor Maydah Lestika	-	PPNPN	-
31	Erwin Tirajul Akbar	-	PPNPN	-
32	Ega Ayu Ananda	-	PPNPN	-
33	Masrun	-	PPNPN	-
34	Suci Paramita	-	PPNPN	-
35	Nurul Hidayah	-	PPNPN	-
36	Samsi	-	PPNPN	-
37	Mohamad Aji Purnomo	-	PPNPN	-
38	Harco Yossie	-	PPNPN	-
39	Rexzy Adhipura	-	PPNPN	-

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



3. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Doktoral (S-3)	-
2	Magister (S-2)	5
3	Sarjana (S-1)	20
4	Diploma (D-3)	1
5	SLTA/Sederajat	1
6	SLTP/Sederajat	-
7	SD/Sederajat	-

4. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berdasarkan Jabatan

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	
HAKIM	Jumlah
Ketua	1
Wakil	1
Hakim	4
TEKNIS	
	Jumlah
Panitera	1
Panitera Muda	3
Panitera Pengganti	2
Jurusita	-
Jurusita Pengganti	1
Pelaksana	5
NON TEKNIS	
	Jumlah
Sekretaris	1
Kepala Subbagian	3
Fungsional	1
Pelaksana	4
PPNPN	12
Total	39

A. Mutasi

1. Mutasi Keluar

Pada Tahun 2024, Hakim maupun Pegawai yang mutasi (keluar) dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah ;

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT
1	I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.	Ketua PN Pangkalan Bun	Ketua PN Wates	8 Agustus 2024
2	Budiyen Noor, S.H.	Panitera PN Pangkalan Bun	Panitera PN Tulungagung	9 Desember 2024

2. Mutasi Masuk

Pada Tahun 2024, Hakim maupun Pegawai yang mutasi (masuk) dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah ;

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT
1	Ikha Tina, S.H., M.Hum.	Hakim PN Serang	Wakil Ketua PN Pangkalan Bun	5 Januari 2024
2	Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN Kebumen	Ketua PN Pangkalan Bun	7 Agustus 2024
3	Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.	Hakim PN Pangkalan Balai	Hakim PN Pangkalan Bun	5 Agustus 2024
4	Harly Marilyn Simanjuntak, S.H.	Panitera PN Singkawang	Panitera PN Pangkalan Bun	10 Desember 2024

B. Promosi

Pada Tahun 2024, Hakim maupun Pegawai yang dipromosikan untuk memangku jabatan baru pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah ;

NO	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	TMT

C. Pensiun

Pada Tahun 2024, Hakim maupun Pegawai pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak ada pensiun.

D. Diklat

Pada Tahun 2024, Hakim maupun Pegawai pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mendapat pelatihan ataupun pendidikan adalah:

NO	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT	TANGGAL PELAKSANAAN	PELAKSANAAN DIKLAT
1	Budiyon Noor, SH 197209171994031001	Panitera	Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA	Februari – Mei 2024	Secara Daring dari Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
2	Husni Thamrin, S.T. 197803082009041003	Sekretaris	Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA	Februari – Mei 2024	Secara Daring dari Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
3	Didik Sulaiman, S.H. 198110182012121003	Kasubbag Umum dan Keuangan	Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA	Februari – Mei 2024	Secara Daring dari Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
4	Diyah Eka Prasetya Rini, S.I.P 199405152019032013	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan	Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA	Februari – Mei 2024	Secara Daring dari Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
5	Muhammad Aji Purnomo	PPNPN	Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA	Februari – Mei 2024	Secara Daring dari Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
6	Harco Yossie	PPNPN	Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA	Februari – Mei 2024	Secara Daring dari Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

7	Samsi	PPNPN	Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA	Februari – Mei 2024	Secara Daring dari Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
8	Noor Maydah Lestika, S.Pd.	PPNPN	Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA	Februari – Mei 2024	Secara Daring dari Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
9	Ega Ayu Ananda, S.H.	PPNPN	Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA	Februari – Mei 2024	Secara Daring dari Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
10	Suci Paramita, S.H.	PPNPN	Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA	Februari – Mei 2024	Secara Daring dari Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
11	Nurul Hidayah, S.Ak.	PPNPN	Pelatihan Pengadilan Inklusi ke 4 yang diadakan oleh SAPDA	Februari – Mei 2024	Secara Daring dari Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
12	Daniel Simanihuruk, S.Sos	Penelaah Teknik Kebijakan	Diklat Manajemen Administrasi Peradilan Tingkat Dasar Angkatan II	12 Februari – 1 Maret 2024	Balitbang & Diklat Hukum Dan Peradilan Ma-Ri
13	Daniel Simanihuruk, S.Sos.	Penelaah Teknik Kebijakan	Diklat Kepemimpinan Dasar Bela Negara Angkatan II	12 Februari – 1 Maret 2024	Balitbang & Diklat Hukum Dan Peradilan Ma-RI
14	Sulistyawati	Bendahara	Sistem Pengendalian Interen	24-28 Juni 2024	Secara Daring dari Kantor Pengadilan

			Pemerintah secara Daring (Online)		Negeri Pangkalan Bun
15	Budiyar Noor, S.H.	Panitera	Sertifikasi Mediator bagi Hakim dan Panitera	- 8 – 13 Juli 2024 - 14 26 Juli 2024	- Secara online dari Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun - di Pusdiklat Mahkamah Agung RI Megamend ung Jawa Barat
16	Chanro Simamora, S.H.	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	Pelatihan Manajemen ASN Gelombang III Angkatan IV	23 Juli – 2 Agustus 2024	Secara online dari Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
17	Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.	Ketua	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Kepailitan dan PKPU Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tahap II	2 – 6 September 2024	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung
18	Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.	Hakim	Pelatihan Sertifikasi Hakim Sistem Peradilan Pidana anak bagi Hakim Tk. I Peradilan	22 September – 9 Oktober 2024	Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Diklat

			Umum Seluruh Indonesia Tahap II		Kumdil Mahkamah Agung
19	Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.	Ketua	Pelatihan Sertifikasi Hakim Niaga Bidang Hak Kekayaan Intelektual Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia Tahap II		Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI
20	Soraya Isfandari, S.Pd.SD.	Analisis Tatalaksana	Pemetaan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya secara daring (Online)	25 s.d 28 November 2024	Secara daring dari kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
21	Sulistyawati	Bendahara	Pemetaan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya secara daring (25 s.d 28 November 2024	Secara daring dari kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

			Online)		
22	Menak Manullang A.Md.	Klerek- Pengelola Data dan Informasi	Diklat Bendahara Penerimaan	02 s.d 06 Desember 2024	Secara daring dari kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pada Tahun 2024, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memperoleh anggaran sebesar Rp. 5.533.182.000,- terdiri dari DIPA 01 sebesar 5.328.182.000,- dan DIPA 03 sebesar Rp. 205.000.000,-. Anggaran Tahun 2024 lebih besar disbanding dengan anggaran Tahun 2023.

Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2023 DIPA 01 :

No	Rincian	2023	2024
1	Anggaran	5.230.131.000	5.328.182.000
2	Realisasi	5.224.072.577	5.326.988.679
3	Persentase Realisasi	99,93%	99,98%

Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2023 DIPA 03 :

No	Rincian	2023	2024
1	Anggaran	149.000.000	205.000.000
2	Realisasi	148.976.000	204.938.000
3	Persentase Realisasi	99,98%	99,97%

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Gedung

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB yang dipakai sekarang ini adalah gedung bertingkat II pada bagian muka dan terletak di Jalan Sutan Syahrir No.16, Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.



Gedung Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memiliki luas gedung 4416 m². Disamping halaman kantor terdapat sebuah Musholla “AL-FATH” yang dibangun pada tahun 2014, dan bagian belakang kantor terdapat Lapangan Tenis yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Dibelakang dan disamping kanan kantor dibagikan tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat khusus Hakim dan Pegawai, sedangkan pada bagian samping kanan untuk Kendaraan Tahanan, Polisi dan Pengunjung.

Terdapat Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pojok E-Court untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terdapat juga Ruang Mediasi, Perpustakaan, Ruang Tunggu Pengunjung, Ruang Menyusui atau Laktasi, Tempat Merokok (Smoking Area), serta toilet yang bersih untuk pengunjung dan pegawai, dan toilet khusus difabel. Serta ruang tunggu pengunjung di samping ruang sidang utama. Pengadilan Negeri Pangkalan Bun juga menyediakan ruang tamu terbuka di samping Ruang PTSP sebagai bukti keterbukaan dalam menerima tamu.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah menerapkan sistem satu pintu secara terpadu sehingga seluruh pengunjung, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum dapat ke gedung dengan melewati satu pintu depan saja agar dapat dengan mudah dipantau. Terlebih lagi setiap tamu yang masuk diwajibkan melapor ke Meja PTSP dan akan diberi tanda pengenal berupa kartu pengunjung.

Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelayanan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB kepada masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berupa melakukan beberapa terobosan dan renovasi guna melengkapi sarana dan prasarana, antara lain:

- Perbaikan Dinding Segita Depan Mushola



- Perbaikan Dinding Area Wudhu di Mushola



- Penggantian Paving Mushola



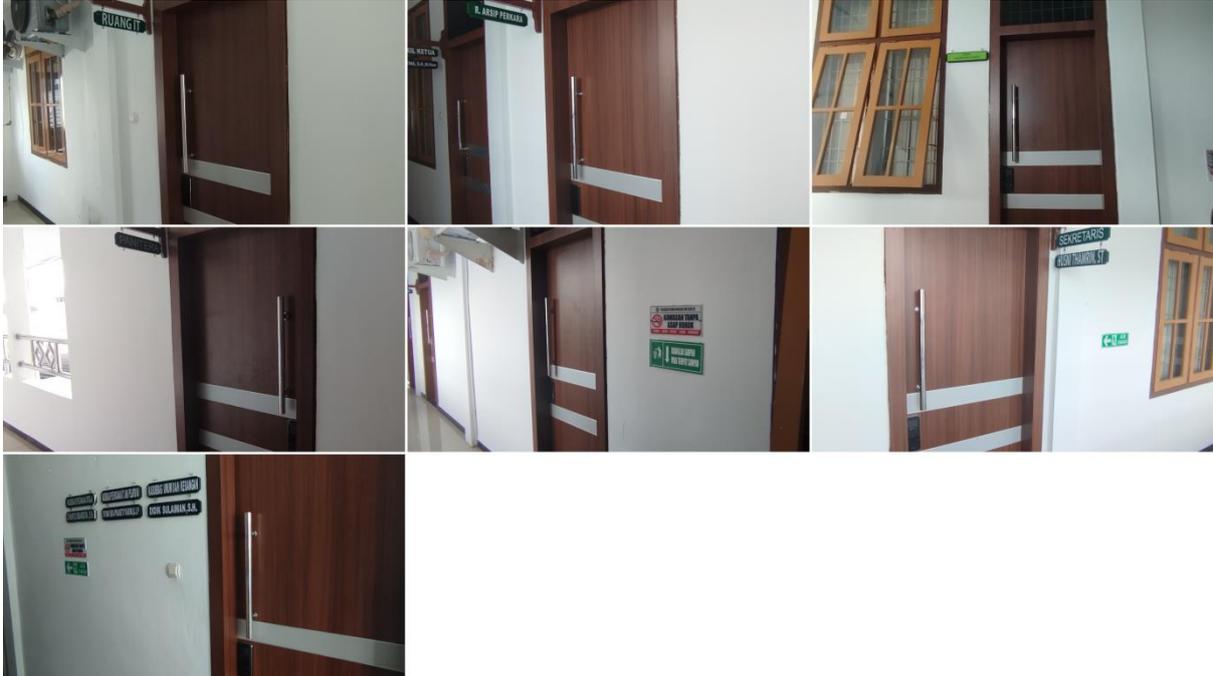
- Perbaiki Ruang Tunggu Pengunjung



- Perbaiki Area Belakang *Pantry*



- Perbaikan 7 buah Pintu Ruang Kantor/Access door (Ruang IT, Ruang Arsip, Ruang Media Center, Ruang DYK, Ruang Kesekretariatan, Ruang Panitia, dan Ruang Sekretaris)



- Pemasangan Paving pada Rumah Dinas Hakim



- Pengecatan Gedung Bagian Depan



- Pengecatan Area Parkir Pengunjung



- Perbaiki Jalur Disabilitas/Guiding Block



2. Gedung Tempat Sidang Keliling (*Zetting Platz*)

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai tempat sidang di Luar Gedung Pengadilan (*Zetting Platz*) yaitu di Jalan Tjilik Riwut, Kelurahan Mendawai, Kabupaten Sukamara dengan luas 8288 m² dengan sertifikat nomor : 300/1987 namun berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 22/SEK/SK/I/2023 dialihkan kepada Pengadilan Agama Sukamara untuk kepentingan pembangunan Gedung Pengadilan Agama Sukamara tahun 2023. Untuk itu aset BMN *Zetting Platz* di Sukamara telah ditransfer keluar melalui Aplikasi SIMAK BMN. *Zetting Platz* lainnya terletak di Pangkat, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat dengan status rusak parah. Pada Tahun 2024 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah beberapa kali melakukan sidang keliling di Kabupaten Sukamara, berikut rinciannya:

No	Tanggal Sidang	Lokasi Sidang	Jumlah Perkara	Jumlah Anggaran yang digunakan	Ket
1	07-08 Maret 2024	Sukamara	6	Rp. 3.960.000	
2	06-07 Juni 2024	Sukamara	11	Rp. 13.320.000	
3	25-26 Agustus 2024	Sukamara	6	Rp. 13.200.000	
4	07-08 November 2024	Sukamara	7	Rp. 7.920.000	
5	12-13 Desember 2024	Sukamara	6	Rp. 11.580.000	
Jumlah			36	Rp.49.980.000	

3. Rumah Dinas

Bahwa untuk kenyamanan Pejabat baik Teknis maupun structural yang melaksanakan tugasnya di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pemerintah telah menyediakan Rumah Dinas untuk tempat tinggal sebanyak 10 unit dengan dibebani kewajiban untuk setiap bulannya membayar sewa kepada Negara, adapun kondisi Rumah Dinas tersebut per tanggal 31 Desember 2024 :

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Rumah Dinas Ketua	1	1	-	-	
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	1	-	-	
3	Rumah Dinas Hakim	6	6	-	-	
4	Rumah Dinas Panitera	1	1	-	-	
5	Rumah Dinas Sekretaris	1	1	-	-	
Jumlah		10	10	-	-	

Rumah Dinas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut per tanggal 31 Desember 2024 sudah di tempat Pejabat Teknis maupun Struktural dengan rincian sebagai berikut:

- Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan yang terletak di Jalan Jendral Soedirman di tempati oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Bapak Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H. dengan nomor SK: 162/SEK.W16-U3/SK.RT1/VIII/2024.
- Rumah Dinas Hakim yang terletak di Jalan Sutan Syahrir di tempati oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Ibu Ikha Tina, S.H., M.Hum., dengan nomor SK: 019/SEK.W16-U3/SK.RT1/I/2024.
- Rumah Dinas Hakim yang terletak di Jalan Sutan Syahrir di tempati oleh sdr. Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., dengan nomor SK: 014/SEK.W16-U3/SK.RT1/I/2024.

- Rumah Dinas Hakim yang terletak di Jalan Ahmad Wongso di tempati oleh sdr. Erick Ignatius Christoffel, S.H., dengan nomor SK: 015/SEK.W16-U3/SK.RT1/I/2024.
- Rumah Dinas Hakim yang terletak di Jalan Ahmad Wongso di tempati oleh sdr. Firmansyah, S.H., dengan nomor SK: 016/SEK.W16-U3/SK.RT1/I/2024.
- Rumah Dinas Hakim yang terletak di Jalan Ahmad Wongso di tempati oleh sdr. Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H. dengan nomor SK: 163/SEK.W16-U3/SK.RT1/VIII/2024.
- Rumah Dinas Panitera yang terletak di Jalan Sudirman, SH di tempati oleh sdr. Harly Marlyn Simanjuntak, S.H., dengan nomor SK: /247/SEK.W16-U3/SK.RT1/XII/2024.
- Rumah Dinas Ketua Pengadilan yang terletak di Jalan Abdullah Mahmud di tempati oleh sdr. Masrianor, S.H., dengan nomor SK: 210/SEK.W16-U3/SK.RT1/VIII/2024.
- Rumah Dinas Sekretaris yang terletak di Jalan Sudirman, SH di tempati oleh sdr. Husni Thamrin, S.T., dengan nomor SK: 017/SEK.W16-U3/SK.RT1/VIII/2024.

4. Kendaraan Dinas

Bahwa untuk kenyamanan Pejabat Teknis maupun Struktural yang melaksanakannya tugas di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam hal ini Pemerintah telah menyediakan Kendaraan Dinas untuk transportasi dan membantu kelancaran dalam melaksanakan tugas, adapun Kendaraan Dinas tersebut per tanggal 31 Desember 2024 :

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Pajero Sport Dakkar	2022	✓	-	-	Mobil Dinas Ketua
2	Toyota Kijang Innova Model Minibus	2010	✓	-	-	Mobil Dinas Wakil Ketua
3	Toyota Kijang Super Long Model Minibus	2003	✓	-	-	Mobil Dinas Panitera
4	Toyota Kijang Innova	2007	✓	-	-	Mobil Dinas

	Model Minibus					Sekretaris
5	Toyota Kijang Super Short	1991	✓	-	-	Mobil Dinas Operasional
II Jenis Kendaraan Roda 2						
1	Honda Kharisma	2005	✓	-	-	
2	Honda Kharisma	2005	✓	-	-	
3	Honda Mega Pro	2006	✓	-	-	
4	Honda Supra X	2003	✓	-	-	
5	Honda Win	1994	✓	-	-	

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun setiap kendaraan dinas memiliki penanggungjawab masing-masing, adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Uraian	Penanggung Jawab	Nomor SK	Keterangan
I Jenis Kendaraan Roda 4				
1	Pajero Sport Dakkar	Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H.	188/SEK.W16- U3/SK.RT1/VIII/2024	Pinjam Pakai Pemda Kotawaringin Barat
2	Toyota Kijang Innova Model Minibus	Ikha Tina, S.H., M.Hum.	118/SEK.W16- U3/SK.RT1/I/2024	
3	Toyota Kijang Super Long Model Minibus	Didik Sulaiman, S.H.	024/SEK.W16- U3/SK.RT1/I/2024	
4	Toyota Kijang Innova Model Minibus	Husni Thamrin, S.T.	021/SEK.W16- U3/SK.RT1/I/2024	Pinjam Pakai Pemda Sukamara
5	Toyota Kijang Super Short	Harly Marlyn Simanjuntak, S.H.	247/SEK.W16- U3/SK.RT1/XII/2024	
II Jenis Kendaraan Roda 2				
1	Honda Kharisma	Husni Thamrin, S.T.	076/SEK.W16- U3/SK.RT1/I/2024	
2	Honda Kharisma	Masrianor, S.H.	077/SEK.W16- U3/SK.RT1/I/2024	
3	Honda Mega Pro	Hariyanto	023/SEK.W16- U3/SK.RT1/I/2024	
4	Honda Supra X	Wahyudi	022/SEK.W16- U3/SK.RT1/I/2024	
5	Honda Win	Didik Sulaiman, S.H.	024/SEK.W16- U3/SK.RT1/I/2024	

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mendukung jalannya peradilan baik secara teknis maupun secara administratif sehingga bisa memerikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan. Berikut ini Sarana dan Prasarana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun :

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
I	Sarana dan Prasarana Gedung		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	1	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	3	
7	Ruang Sidang Anak	1	
8	Ruang Kepaniteraan	3	
9	Ruang Kesekretariatan	1	
10	Ruang Panitera Pengganti	1	
11	PTSP	1	
12	Pojok e-Court	1	
13	Ruang Media/Diversi	1	
14	Ruang Jaksa	1	
15	Ruang Posbakum	1	
16	Ruang Penasihat Hukum	1	
17	Ruang Tunggu Sidang Anak	1	
18	Perpustakaan	1	
19	Ruang Serba Guna	1	
20	Ruang IT	1	
21	Ruang Arsip	2	Bertambah 1 pada tahun 2021
22	Ruang Persediaan	1	
23	Ruang Barang Bukti	1	
24	Gudang	1	
25	Ruang Ibu Menyusui/Laktasi	1	

26	Ruang Tahanan Pria	1	
27	Ruang Tahanan Wanita	1	
28	Mushola	1	
29	Ruang Tamu Terbuka	1	
30	Tempat Merokok/ <i>Smoking Area</i>	1	
31	Toilet	11	
32	Toilet Difabel	1	
33	Ruang Tunggu Pengunjung	1	
34	Pos Satpam/Keamanan	-	Masih belum tersedia
II	Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	Minibus	3	
2	Sepeda Motor	6	
3	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	2	
4	Lemari Besi/Metal	7	
5	Lemari Kayu	10	
6	Rak Besi	30	
7	Filling Cabinet Besi	6	
8	Brankas	2	
9	Tabung Pemadam Api	4	
10	CCTV	24	
11	Mesin Absensi	2	
12	Papan Pengumuman	2	
13	Meja Kerja Kayu	32	
14	Kursi Besi/Metal	64	
15	Kursi Kayu	32	
16	Sice	2	
17	Bangku Panjang Kayu	30	
18	Meja Rapat	1	
19	Meja Komputer	7	
20	Tempat Tidur Besi	1	
21	Meja Resepsionis	2	
22	Mesin Pemotongan Rumput	1	
23	AC Split	22	
24	Kipas Angin	1	
25	Televisi	9	
26	Amplifier	3	
27	Wireless	1	

28	Dispenser	2	
29	Lambang Instansi	1	
30	Handy Cam	1	
31	Karpet	6	
32	Gordy/Kray	44	
33	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	
34	UPS	7	
35	Digital LED Running Text	1	
36	Kamera Digital	1	
37	Facisimile	1	
38	Genset	2	
39	Komputer Jaringan Lainnya	3	
40	PC Unit	34	
41	Laptop	17	Bertambah 6 unit pada tahun 2022 perolehan dari Mahkamah Agung
42	Printer	27	Bertambah 2 unit pada tahun 2024 perolehan dari Badilum
43	Scanner	9	Bertambah 4 unit pada tahun 2024 perolehan dari Badilum
44	Server	3	
45	Router	6	
46	Rak Server	3	
47	Switch	1	
48	Audio Mixer	1	
49	Video Conference Camera	2	
50	Speaker	4	
51	Mic	11	

C. T
ekno
logi
dan
Infor
masi
U
paya
meni
ngkat
kan
pelay
anan
publi
k
men
uju
layan
an
prim
a,
Peng
adila
n
Neger

i Pangkalan Bun telah mencoba mencanangkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan professional dalam memberikan pelayanan yang maksimal, bermartabat, transparan dan akuntabel, hal ini sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menempatkan pembenahan teknologi informasi sebagai salah satu prioritas perubahan yang diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas, dan transportasi yang lebih modern dan terpadu. Kebijakan yang diambil salah satunya adalah pendampingan secara terus menerus baik dari tingkat supervisi, operator, maupun user dalam implementasi dari masing-masing aplikasi. Berikut ini gambaran singkat dukungan teknologi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun:

No	Nama Pengadilan	Alamat Website	Alamat SIPP Web	Versi SIPP Lokal yang terpasang	Nama Provider Internet 7 Bandwith	Model Type Server	Fungsi Sever	Kondisi Server
1	Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB	https://pn-pangkalanbun.go.id/baru	https://sipp.pn-pangkalanbun.go.id/	5.6.4		Fujitsu RX 1330 M1	SIPP, MIS, dan PTSP	Baik
						Rainer Server SV110C4	Maintenance, Sinkronisasi, dan Back Up Data	Baik
						Fujitsu TX 1330 M4	Back Up Data SIPP dan MIS serta Aplikasi Lainnya	Baik

Berikut sarana dan fasilitas teknologi informasi yang dimiliki Pengadilan Negeri Pangkalan Bun :

1. Perangkat Keras (*Hardware*)

Untuk pengelolaan Teknologi, Informasi, perangkat keras yang tersedia pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun :

- a. Server : 3 unit
- b. Personal Computer : 34 unit
- c. Komputer Jaringan Lainnya : 3 unit
- d. Laptop : 17 unit
- e. Mikrotik : 1 unit
- f. Switch 24 Port : 1 unit

- g. Scanner : 9 unit
- h. Printer : 27 unit
- i. Televisi : 9 unit
- j. Faximile : 1 unit
- k. Kiosk : 1 unit
- l. 1 (satu) alat perekam visual berupa :
 - 1 HardDisk External
 - 16 Kamera CCTV
 - 1 Kamera DSLR (Kondisi Rusak)
 - 1 Handicam

2. Perangkat Lunak (Software)

Untuk pengelolaan Teknologi Informasi, perangkat lunak yang tersedia pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yaitu :

- a. SIPP sudah menggunakan versi 5.6.4.
- b. Website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sudah disesuaikan dengan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.
- c. Informasi mengenai Tilang (Pidana Lalu Lintas), dapat diakses melalui url tilang.pn-pangkalanbun.go.id
- d. Aplikasi Jadwal Sidang yang terkoneksi dengan SIPP lokal.
- e. Aplikasi Perpustakaan Lokal dan online (pustaka.pn-pangkalanbun.go.id)
- f. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP (MIS)
- g. Aplikasi Papan Informasi
- h. Antrian PTSP
- i. Aplikasi Panggilan Sidang
- j. Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- k. E-Court
- l. E-Berpadu (elektornik berkas pidana terpadu) adalah integrasi berkas pidana antar penegak huku. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
- m. SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan)
- n. One Gate System Request, data permintaan barang ATK atau jasa perbaikan yang dapat diakses secara online.

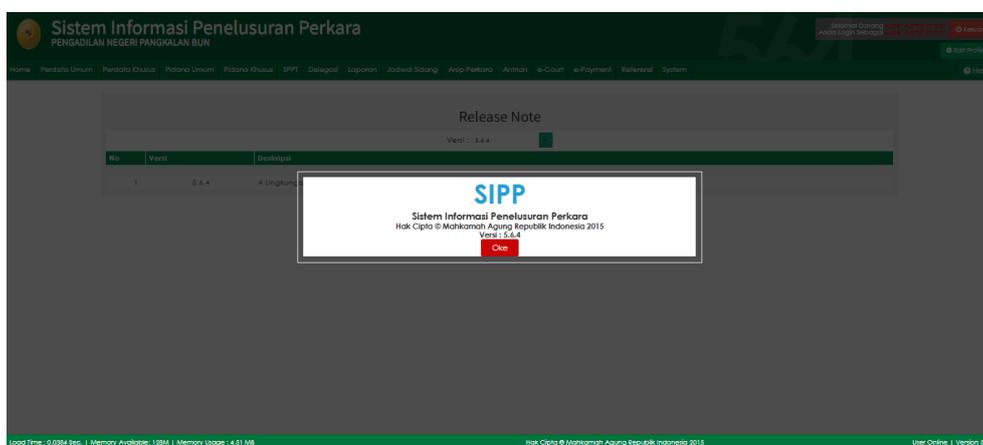
- o. File Sharing di Server
- p. Audio Anti Gratifikasi
- q. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara online
- r. Assistant Virtual Informasi dan Layanan (AVILA)
- s. PTSP Online
- t. Email resmi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (pangkalanbunpn@gmail.com), email bantuan delegasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (bantuandelegasipnpu@gmail.com), dan email Pengaduan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (pengaduanpnpu@gmail.com)

Pada Subbagian Umum dan Keuangan menggunakan aplikasi-aplikasi yang terhubung dengan instansi lain, diantaranya adalah Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi SIMAN, Aplikasi Persediaan, Aplikasi SIMANTAP, Aplikasi Komdanas, Aplikasi SILABI, Aplikasi SIMARI, Aplikasi SIMPONI, Aplikasi MONEV BAPENAS, Aplikasi Monev Anggaran, Aplikasi SIRUP, dan e-SADEWA.

Pada Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksanaan menggunakan aplikasi seperti Aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian), aplikasi e-kinerja, aplikasi komdanas, dan aplikasi SIMARI.

3. SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Pengelolaan Teknologi Informasi terkait dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sudah menggunakan versi 5.6.4.

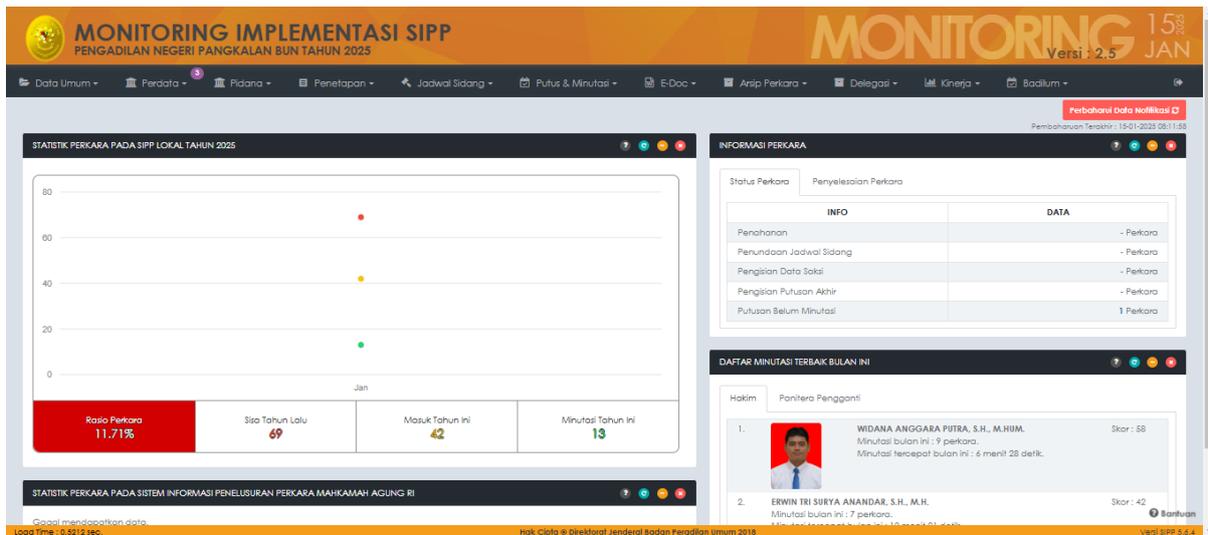




Statistik Perkara Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sesuai dengan SIPP pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Bulan	Perkara Masuk	Perkara Minutasi	Sisa Perkara Bulan Ini
1	Januari	48	66	70
2	Febuari	48	43	75
3	Maret	67	47	95
4	April	45	44	96
5	Mei	55	47	104
6	Juni	55	84	75
7	Juli	48	47	76
8	Agustus	66	52	90
9	September	62	69	83
10	Oktober	47	37	93
11	November	58	69	82
12	Desember	46	59	69
Total		645	664	Sisa Perkara Tahun 2024 :69
Rasio Perkara : 102.94%				

Sehubungan dengan Pasal 27 Ayat (1) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, bahwa “Pengadilan wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi, dan ketepatan waktu pengisian data SIPP”. Maka Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melaksanakannya dengan mengaplikasikan aplikasi Monitoring dan Implementasi SIPP (MIS) dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang digunakan untuk memonitoring dan mengawasi kepatuhan pengisian data SIPP. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 versi MIS yang digunakan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah MIS versi 2.5.



Dengan adanya MIS pengisian data SIPP bisa dimonitoring sehingga pengisian bisa lebih valid, akurasi, dan tepat waktu.

4. E-Court

E-Court adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan secara online. Aplikasi E-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. E-Court merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik.



BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN

PUBLIK

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dimulai tahun 2017 yang diawali dengan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Kepala Kepolisian Resort dan Kepala Kejaksaan Negeri Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau, dan Sukamara. Pada Tanggal 14 Januari 2019, Pencanangan Zona Integritas diulang kembali dan disaksikan oleh Unsur Pimpinan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Sukamara serta *stakeholder* lainnya di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pembangunan Zona Integritas dilaksanakan sesuai dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Peraturan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Dokumen Rencana Kerja tersebut berisikan komponen, indikator, rencana aksi, bukti fisik, dan target waktu pencapaiannya pada masing-masing komponen pengungkit yang terdiri dari pemenuhan dan reform meliputi area I sampai dengan area VI serta komponen hasil. Dan untuk memastikan rencana kerja dapat berjalan sesuai jadwal dan sesuai targer maka diperlukan adanya monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Perkembangan dan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terdiri dari penilaian pada komponen pengungkit dan komponen hasil, yaitu :

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	KET
A	Pengungkit		
	1 .Aspek Pemenuhan	30	Proses Penilaian Mandiri pada Aplikasi PMZI
	2. Aspek Reform	30	Proses Penilaian Mandiri pada Aplikasi PMZI
B	Hasil		
	1 .Pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN	20	Proses Penilaian Mandiri pada Aplikasi PMZI
	2. Kualitas Pelayanan Publik	20	Proses Penilaian Mandiri pada Aplikasi PMZI

Pada Tahun 2021 Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berhasil meraih predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi. Untuk tahun 2024 ini, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempertahankan predikat WBK dari Kemenpan RB dan juga melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

B. Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH)

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Jika tim penilai memutuskan bahwa nilai akhir satuan kerja sudah memenuhi standar yang telah ditentukan dan tidak ada temuan berupa; berkas hilang, penyalahgunaan keuangan, operasi tangkap tangan dan tindakan

pungutan liar (operasi saber pungli), maka terhadap satuan kerja dapat diberikan Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul.

Predikat sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) :

- Paripurna
- Unggul
- Utama
- Baik
- Cukup

Pada Tahun 2024, berdasarkan Salinan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 tentang Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas Ia Khusus, Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II Tahun 2024, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mendapatkan Predikat **Utama** dengan perolehan nilai **791,88**.

C. PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melaksanakan system satu pintu atau dikenal dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini berdasarkan Surat Keputusan Direkter Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 dan Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019. Dalam sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini masyarakat pengguna pengadilan, cukup dilayani melalu satu pintu aja,sehinggs ASN di lingkungan peradilan terhindar dari komunikasi dengan para pihak yang berpekara. Hal ini merupakan salah bentuk dari Pembangunan Zona Intergritas.

Pelayan yang tersedia pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu antara lain :

a. Kesekretariatan

Dibidang Kesekretariatan ini telah dilaksanakan tata persuratan secara elektronik yang artinya semua surat maupun surat keluar telah didokumentasikan secara elektronik, sehingga memudahkan dan mempercepat dalam tata persuratan. Pelayanan bagian Kesekretariatan lainnya adalah register buku tamu. Dengan adanya register buku tamu ini

maka semua tamu baik yang akan dilayani oleh Meja PTSP maupun tamu yang menghadao Hakim atau ASN Pengadilan akan tercatat dengan detail sehingga pengawasannya pun akan lebih mudah dan pimpinan bisa memantau secara langsung.

b. Kepaniteraan

Semua jenis pelayanan kepaniteraan telah dilayani secara elektronik.

1. Kepaniteraan Hukum

Pelayanan yang terdapat pada Kepaniteraan Hukum antara lain :

- Permohonan Surat Keterangan belum pernah dipidana bagi masyarakat yang memerlukan. Permohonan Surat Keterangan tersebut telah menggunakan aplikasi eraterang (eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id) yang telah terkoneksi langsung dengan aplikasi PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Aplikasi eraterang diimplementasikan mulai bulan Agustus 2019. Permohonan surat keterangan melalui aplikasi eraterang pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2024 139 (Seratus Tiga Puluh Sembilan) permohonan.
- Pihak yang akan mengajukan pengaduan dapat langsung diterima oleh petugas PTSP, untuk diteruskan kepada yang berwenang. Pada Tahun 2024 tidak ada laporan pengaduan yang diterima di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

2. Kepaniteraan Pidana

Pelayanan yang ada pada Kepaniteraan Pidana antara lain;

- E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) meliputi layanan elektronik persetujuan/ijin pengeledahan dan penyitaan, permohonan perpanjangan penahanan dari penyidik/penuntut umum.
- Permohonan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- Pelayanan lain yang menjadi kewenangan Kepaniteraan Pidana.
-

3. Kepaniteraan Perdata

Pelayanan yang ada pada Kepaniteraan Perdata antara lain :

- Pendaftaran perkara melalui *e-Court* , sampai dengan tahapan pembayaran biaya yang dikeluarkan untuk membayar panjar perkara melalui e-SKUM.
- Menerima permohonan untuk mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

D. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam rangka mendorong kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik seperti yang telah diamatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana pada pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang juga menjadi acuan dalam kompetisi ini adalah SK Ketua MA Nomor 026/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan SK Ketua MA Nomor 2-144/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

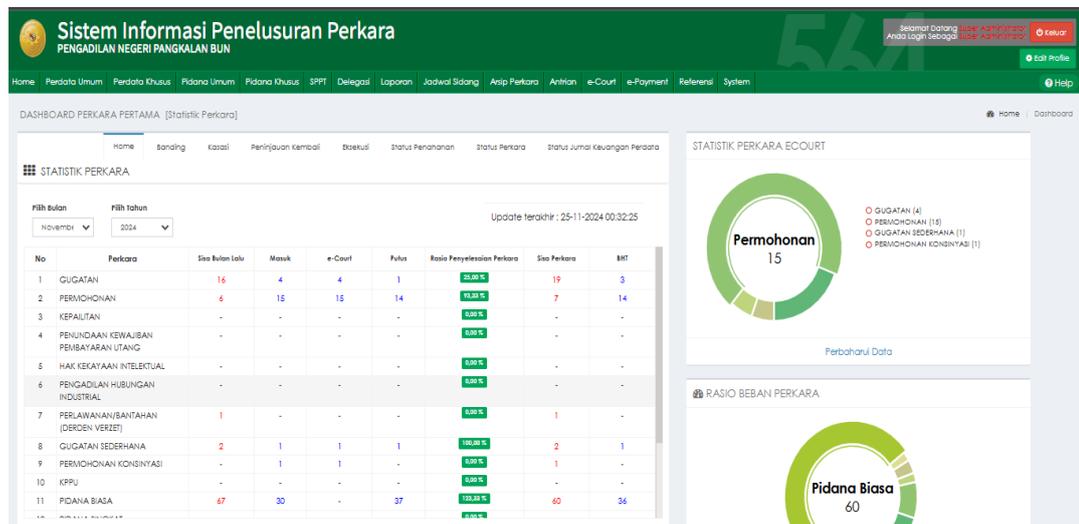
Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun serta peningkatan kinerja bagi Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, maka perlu adanya Inovasi Pelayanan Publik.

1. SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi berbasis web yang diperuntukan untuk menelusuri proses suatu perkara. SIPP ini terdapat 2 versi yaitu SIPP yang hanya diperuntukan Hakim dan Pegawai Pengadilan dan SIPP Umum dengan alamat <https://sipp.pn-pangkalanbun.go.id/> yang diperuntukan untuk masyarakat. Dengan adanya SIPP ini,

masyarakat akan lebih mudah mengetahui informasi proses suatu perkara.



Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

Beranda | Perdata Umum | Perdata Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | **Delegasi**

DATA SELURUH PERKARA

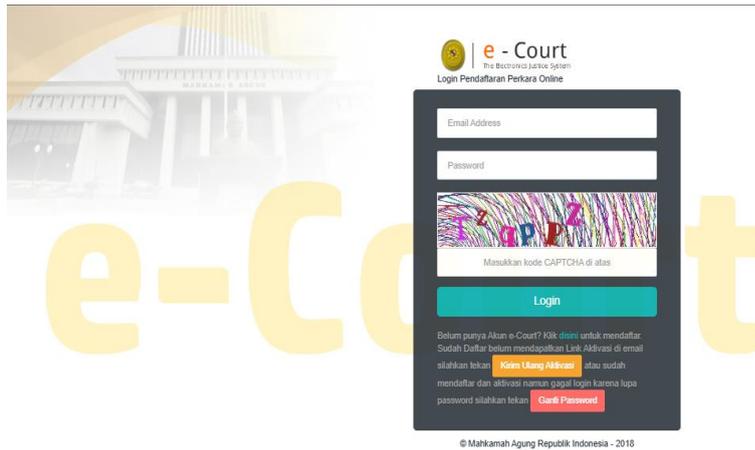
Delegasi Keluar | Delegasi Masuk

Data: Senin, 25 Nov. 2024 09:22:34 WIB, Total: 38,477 Perkara

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	20/Pid.C/2024/PN Pbu	22 Nov 2024	Pencurian	Penyidik Atas Kuasa PU: AKHMAD FAUZI Terdakwa: 1. ISMAWANDI Bin HAMKA 2. UDIN Bin SAMSURITA 3. BADRI Bin MUKRAN	Minutasi	1 Hari	[detail]
2	2487/Pid.LL/2024/PN Pbu	22 Nov 2024	Perkara Lalu-Lintas	Pelanggar: Nawi	Minutasi	1 Hari	[detail]
3	2486/Pid.LL/2024/PN Pbu	22 Nov 2024	Perkara Lalu-Lintas	Pelanggar: Agus	Minutasi	1 Hari	[detail]
4	2485/Pid.LL/2024/PN Pbu	22 Nov 2024	Perkara Lalu-Lintas	Pelanggar: Mandala	Minutasi	1 Hari	[detail]
5	2484/Pid.LL/2024/PN Pbu	22 Nov 2024	Perkara Lalu-Lintas	Pelanggar: Nur. Jamiatun	Minutasi	1 Hari	[detail]
6	2483/Pid.LL/2024/PN Pbu	22 Nov 2024	Perkara Lalu-Lintas	Pelanggar: Rafel. Mita	Minutasi	1 Hari	[detail]

2. e-Court

e-Court adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan secara online. Aplikasi *e-Court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam menerima pendaftaran secara online sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. *Court* merupakan wujud pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.



gc.kisv2.ccr.kaspersky-labs.com/.../kpm_promo_balloon.html?cssSrc=http%3A%2...

3. E-Berpadu

Elektornik Berkas Pidana Terpadu adalah integrasi berkas pidana antar penegak hukum untuk layanan permohonan izin penggeledahan, izin penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana elektronik, permohonan penetapan diversi, izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan.



4. Pojok e-Court

Pojok *e-Court* merupakan fasilitas yang disediakan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk membantu para pihak berpekar yang ini memanfaatkan layanan administrasi perkara secara elektronik. Layanan ini

berada pada aera PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Petugas Pojok *e-Court* bukan saja memberikan penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan hal-hal lainnya mengenai *e-Court* . Selain itu juga dapat membantu mendaftarkan akun pada *e-Court* dan memanfu cara pendaftaran perkara melalui *e-Court*.



5. Eraterang

Layanan yang dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan, sekaligus untuk menghindari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menerapkan aplikasi eraterang. Dengan demikian masyarakat bisa dengan mudah membuat permohonan surat keterangan dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk dapat diupload pada aplikasi eraterang. Surat yang bisa dilayani melalu aplikasi eraterang diantaranya adalah surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit, tidak pernah sebagai terpidana, tidak sedang dicabut hak pilihnya, surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan, atau alasan politik maupun surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan maupun badan hukum. Eraterang beralamat di eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id.



6. Posbakum (Pos Bantuan Hukum)

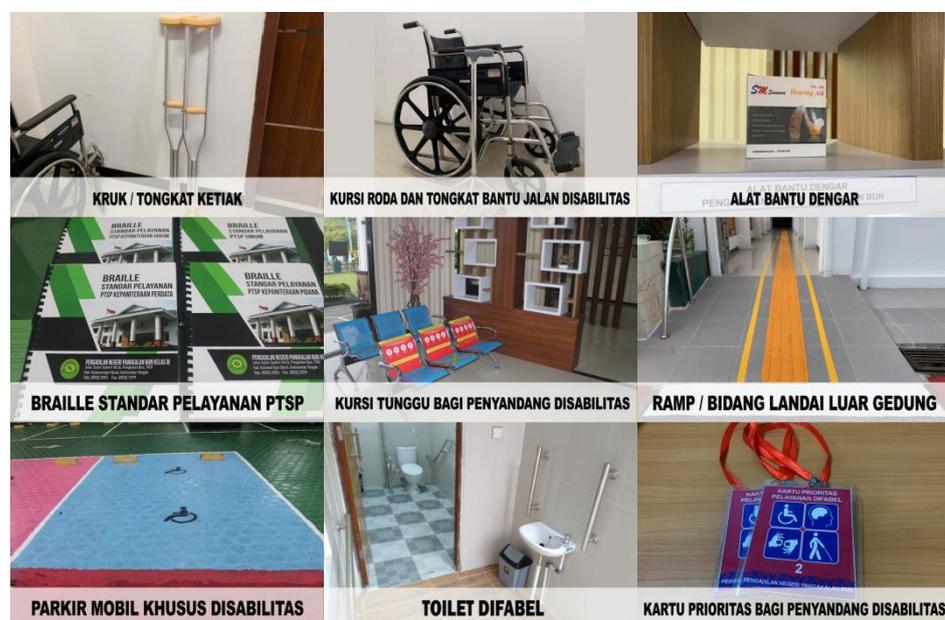
Pos Bantuan Hukum (Posbakum) merupakan ruang yang disediakan oleh setiap Pengadilan Negeri bagi advokat piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk mengisi formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa advokat. Advokat Picket adalah advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum berdasarkan pengaturang yang diatur di dalam kerjasama kelembagaan Pengadilan dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum.



7. Layanan Khusus Penyandang Disabilitas

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menyiapkan fasilitas khusus untuk para penyandang disabilitas. Fasilitas ini disiapkan untuk memudahkan difabel selama berada di Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun. Kemudahan bagi difabel sudah ada sejak tempat turun penumpang (*drop zone*). Untuk penyandang disabilitas diberikan tempat khusus parkir kendaraan yang diberi tanda warna biru. Kemudian disediakan juga *guidling block* dan *warning block* untuk menuju ruang PTSP maupun ruang sidang.

Pada ruang PTSP dan Ruang Sidang disediakan tempat khusus bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda. Selain itu untuk juga disediakan toilet disabilitas sehingga memudahkan para penyandang disabilitas untuk mendapat akses ke toilet. Disamping itu, disediakan juga fasilitas pendukung seperti kursi roda, tongkat jalan, walker, buku braille, dan alat bantu dengar.



8. Protokol Persidangan

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mempunyai petugas sidang yang memang ditunjuk dan bertugas mengurus protokol persidangan. Petugas sidang ini bukan hanya sekedar menjadi petugas yang mengikat Kitab Suci untuk saksi yang bersumpah, akan tetapi justru harus diberi

peran besar untuk mengkoordinir jadwal sidang dan mengatur kelancaran jadwal sidang dengan memastikan kehadiran para pihak.



9. Aplikasi Pemanggilan Persidangan

Aplikasi ini berfungsi untuk mengubah tulisan menjadi suara sehingga bisa membuat pengumuman panggilan sidang yang akan diperkeras melalui speaker di ruang tempat pengunjung.



10. Pengumuman Denda Tilang

Aplikasi yang membantu untuk melakukan pencarian denda tilang secara online pada website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sehingga bisa diakses dimana saja. Pengumuman Denda tilang Online dapat diakses dengan alamat tilang.pn-pangkalanbun.go.id.

INFORMASI PERKARA LALU LINTAS (TILANG)
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN KELAS IB

Data Tilang Berdasarkan Tanggal Sidang

Pilih Tanggal Sidang Perkara Lalu Lintas (TILANG), Kemudian Klik Tampilkan Data
Catat Nomor Urut dan Jumlah Denda + Biaya Perkara

Tampilkan Data

Data Perkara Lalu Lintas (TILANG) Pada Tanggal 2024-11-26 dengan jumlah sebanyak 0 perkara, Silahkan dicatat Nomor Urut dan Jumlah Denda + Biaya Perkara

Show 10 rows Print

PERHATIAN

Pengambilan Barang Bukti Pelanggaran Lalu Lintas dilakukan di KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT dan/atau KEJAKSAAN NEGERI SUKAMARA setelah membayar denda di Bank BRI

Apabila Nama Anda Tidak Tercantum pada Pengumuman, Silahkan menghubungi SATLANTAS POLRES setempat

No	Nama Pelanggar	Tanggal Sidang	Nomor Perkara	Nomor Polisi	Nomor Resi	Jumlah Denda	Biaya Perkara
Data tidak ditemukan							
Menampilkan 0 s/d 0 dari 0 data							

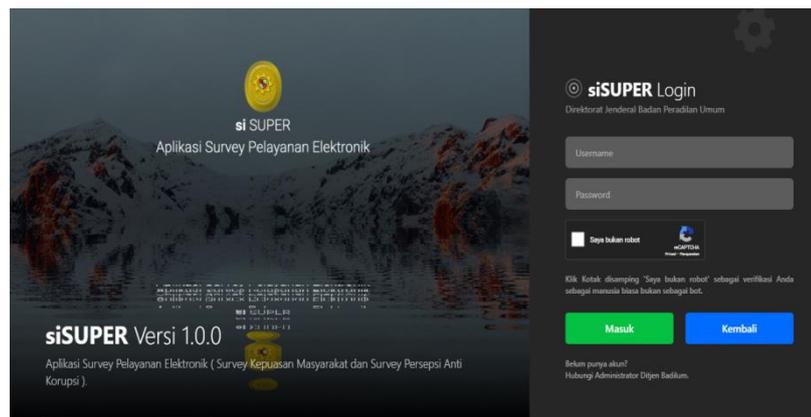
11. Sidang di Luar Gedung Pengadilan (*Zetting Plaatz*)

Sidang Pengadilan yang dilaksanakan diluar gedung pengadilan yang diperuntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi, dan biaya.



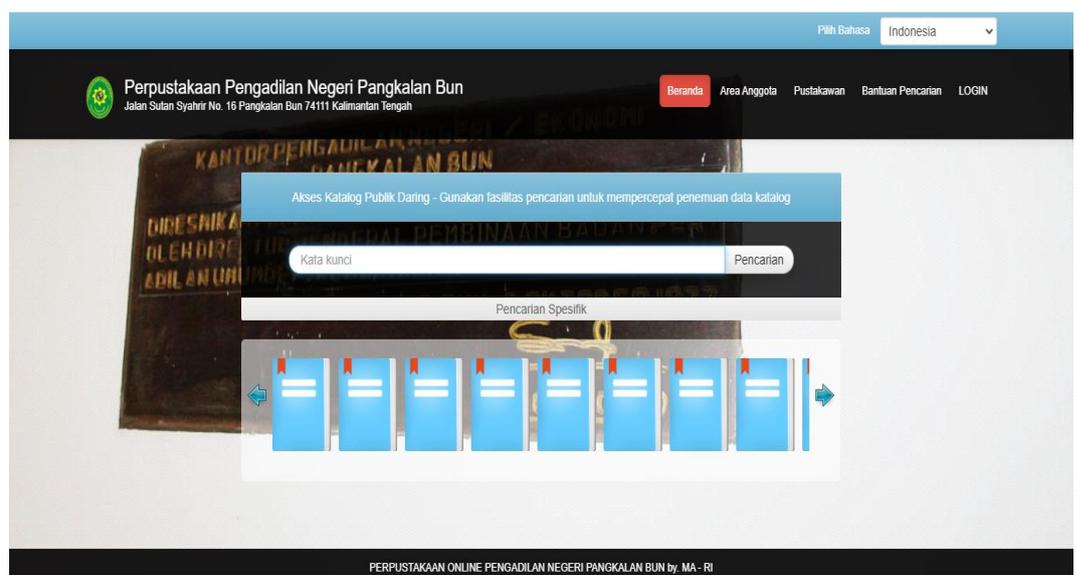
12. Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online

Aplikasi yang membantu pengguna layanan untuk melakukan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Petugas PTSP. Pengguna Layanan dapat langsung melakukan survey secara online melalui perangkat Kiosk yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



13. Aplikasi Perpustakaan Online

Aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan buku perpustakaan mulai dari arsip, peminjaman buku atau pengembalian buku secara elektronik. Aplikasi ini dikelola oleh Petugas Pustakawan yang mengimput ke dalam sistem.



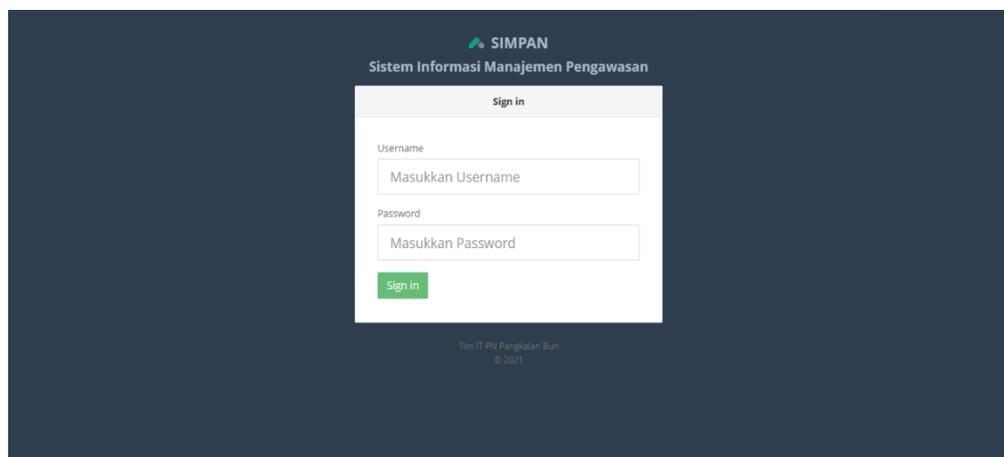
14. Assisten Virtual Informasi dan Layanan (AVILA)

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terus memberikan layanan informasi kepada masyarakat melalui Assisten Virtual yang terhubung dengan whatsapp yang dikelola oleh petugas layanan PTSP. Hal tersebut dilakukan karena aplikasi whatsapp yang sangat mudah untuk dijangkau dan dioperasikan oleh pengguna. Pencari Keadilan dapat mengakses Assistant Virtual melalui website Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.



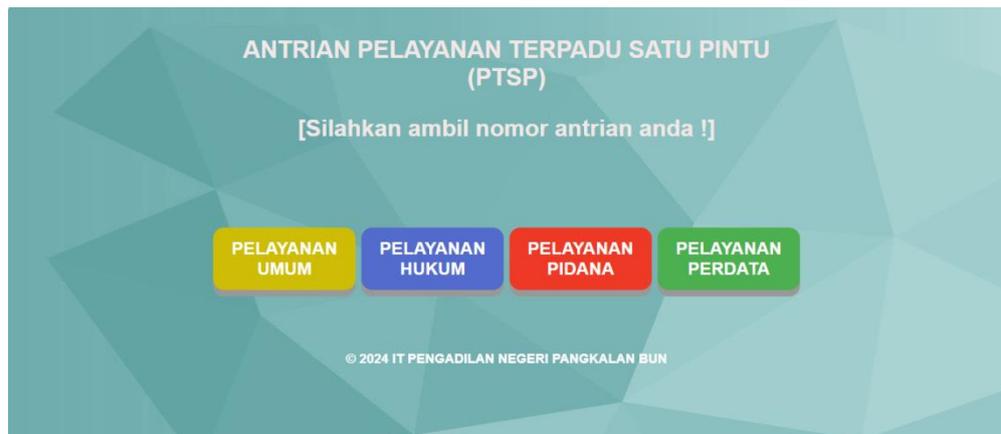
15. SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen Pengawasan)

Aplikasi SIMPAN atau Sistem Informasi Manajemen Pengawasan adalah Aplikasi Manajemen arsip dan monitoring laporan pengawas secara elektronik mulai dari Pengawasan Bidang, Audit Internal, dan Audit Eksternal yang terdiri dari Pengawasan Tingkat Banding maupun Bawas. Sehingga dengan aplikasi ini dapat melihat apakah laporan pengawasan sudah ditindaklanjuti atau belum.



16. Antrian PTSP

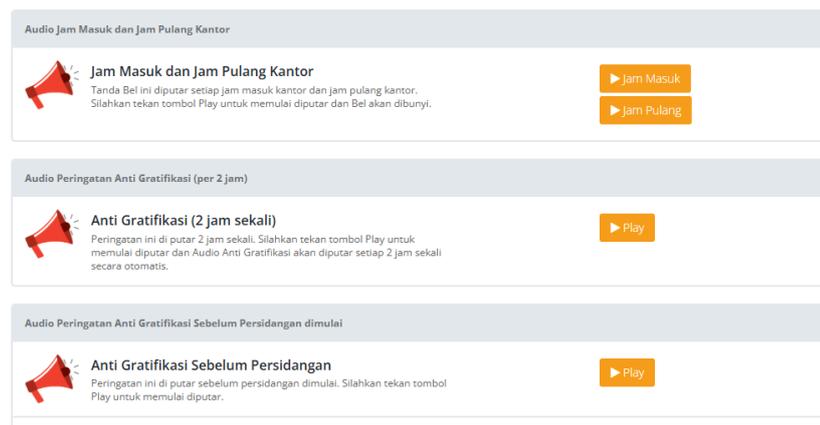
Aplikasi Antrian PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah aplikasi antrian buat pengunjung para pencari keadilan yang berkepentingan terkait dengan bagian meja huku, perdata, pidana, dan umum. Masyarakat atau pengguna layanan yang dapat mengambil nomor antrian pada *computer touchscreen* yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun kemudian dapat munggu sampai nomor antrian dipanggil.



17. Audio Anti Gratifikasi

Aplikasi Audio Peringatan Anti Gratifikasi sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 adalah aplikasi untuk membantu petugas pengadilan didalam melaksanakan tugas untuk membacakan Peringatan Anti Gratifikasi setiap 2 jam melalui mikrofon. Aplikasi ini berfungsi untuk mengumumkan dan memberitahukan kepada pengunjung bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Bun merupakan Wilayah Anti Gratifikasi dan telah mendapat Predikat Wilayah Bebas Dari Korupsi.

Automatic Audio Pengadilan Negeri Pangkalan Bun



18. PTSP Online

Merupakan pelayanan PTSP secara online berbasis video conference via whatsapp sehingga dapat diakses oleh masyarakat dari mana saja.



19. Posbakum Online

Layanan Posbakum Online adalah Layanan menggunakan video call aplikasi Whatsapp agar lebih mudah diakses oleh para pengguna layanan/para pencari keadilan pada pengadilan negeri pangkalan bun. Pengguna layanan Posbakum dapat menghubungi nomor AVILA (Asisten Virtual Informasi dan Pelayanan) yang akan langsung terhubung dengan petugas PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan selanjutnya akan diteruskan kepada petugas Posbakum pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.





BAB VI PENGAWASAN

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Dalam melaksanakan pengawasan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah pengawasan melekat dimana serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian terus menerus dilakukan oleh Atasan Langsung terhadap Bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB selaku Penanggungjawab, dibantu Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB bersama Panitera dan Sektetaris, bersama-sama sebagai pimpinan dalam melaksanakan pengawasan fungsional dan melekat secara internal, setiap saat melakukan pemantauan atas pelaksanaan tugas dan Perilaku Hakim dan Pegawai. Pelaksanaan Pengawasan Internal di Lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun meliputi :

- Pengawasan Hakim Pengawas Bidang, mengacu pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 186/KPN.W16-U3/SK.PW.1.1.1/VIII/2024 tentang Penunjukan dan Penugasan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ;

NO	NAMA PENGAWAS BIDANG	JABATAN	PENGAWAS
1.	Ikha Tina, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan Bidang Kewanitaraan dan Bidang Kesekretariatan

2.	Erick Ignatius Christoffel, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Perdata
			Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3.	Firmansyah, S.H., M.H.	Hakim	Kepaniteraan Pidana
4.	Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.	Hakim	Kepaniteraan Hukum
			Subbagian Kepegawaian, Organisas, dan Tata Laksana
5.	Erwin Tri Surya Anandar, S.H., M.H.	Hakim	Subbagian Umum dan Keuangan
			Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

- Pembinaan dan Pengawasan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Kepaniteraan.
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bidang Kesekretariatan.
- Monitoring dan Evaluasi SOP.
- Monitoring dan Evaluasi Bidang.
- Monitoring dan Evaluasi Uraian Tugas pada masing-masing bagian.
- Monitoring dan Evaluasi kegiatan pada masing-masing tim yang telah dibentuk oleh Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun meliputi ;
 - a) Monitoring dan Evaluasi Manajemen Resiko.
 - b) Monitoring dan Evaluasi Pengaduan.
 - c) Monitoring dan Evaluasi Benturan Kepentingan.
 - d) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.
 - e) Monitoring dan Evaluasi SPPT-TI.
 - f) Monitoring dan Evaluasi SIPP. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Website.
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Delegasi.
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Eksekusi.

- Monitoring dan Evaluasi Panjar Biaya Perkara.
- Monitoring dan Evaluasi Perma No. 6 Tahun 2022 serta Perma No. 1,2, dan 3 Tahun 2022.
- Monitorinf dan Evaluasi Standar Pelayanan Pengadilan.
- KIMWASMAT (Pengawasan dan Pengamatan)

Dilaksanakan pada Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Pangkalan

NO	TANGGAL PENGAWASAN	SUSUSNAN TIM PENGAWAS
1.	21 Oktober 2024-23 Oktober 2024	<ol style="list-style-type: none">1. Didik Wuryanto, S.H., M.Hum2. Maskur, S.H.3. Julius Siberium Timbung, S.E.4. Akhmad Darkuni S.Sos., M.AP5. Wahyunanda T.J. Lambung, S.Pd.

Bun dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kabupaten Sukamara.

B. Evaluasi

Evaluasi Eksternal dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun melalui Pengawas Reguler Daerah. Pelaksanaan Pengawasan Daerah oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 21 Oktober 2024-23 Oktober 2024.



BAB VII PENUTUP

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 sebagaimana disampaikan dapat memberikan gambaran secara umum tentang keadaan pelaksanaan tugas dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, antara lain :

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
2. Percepatan penyelesaian perkara telah dilaksanakan secara maksimal meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis.
3. Keterbukaan informasi dan pelayanan publik telah diupayakan secara baik didukung dengan inovasi-inovasi pelayanan public yang telah dikembangkan dan diterapkan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.
4. Pembinaan dan Pengawasan Internal pada masing-masing bagian telah dilaksanakan dengan baik dan terus-menerus.
5. Pelaksanaan anggaran dan administrasi telah dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan besaran anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA serta telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi berkala sehingga presentasi realisasi tahun 2024 meningkat dari tahun sebelumnya.
6. Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan serta menunjang kompetensi sumber daya manusia bagi hakim dan pegawai masih sangat diperlukan. Hal ini untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan bagi masyarakat dimana diperlukan tenaga kerja yang professional.

B. Rekomendasi

1. Bidang Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Kelas IB sangat kekurangan pegawai untuk Staf Kepaniteraan dan Kesekretariatan sehingga sangat direkomendasikan untuk menambah jumlah pegawai mengingat tenaga Teknis Panitera Pengganti baru ada 2 (dua) orang, Staf Kepaniteraan hanya ada 2 (dua) orang, Staf Kepaniteraan Perdata 2 (dua) orang, Staf Kepaniteraan Hukum hanya ada 1 (satu) orang,

tidak terdapat Juru Sita dan tidak ada tenaga IT pada sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan (PTIP).

2. Peningkatan pengetahuan sumber daya manusia dipandang perlu dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, pembinaan, dan lain-lain. Kesempatan demikian dibutuhkan oleh Seluruh Hakim dan Pegawai, mengingat perkembangan Regulasi Mahkamah Agung terus berkembang serta banyaknya inovasi-inovasi baru dari Mahkamah Agung yang sudah mengimplementasikan teknologi informasi, maka dibutuhkan bimbingan untuk memahami dan mengimplementasikannya.
3. Guna menunjang tugas pokok dan fungsi satuan kerja, Pengadilan Negeri Pangkalan Bun saat ini masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana seperti mobil dinas, laptop, printer, scanner, mebeleur kantor, ruang berkas perkara, AC ruang sidang utama dan perangkat foto/video editing.
4. Perlu adanya anggaran untuk rehabilitasi Gedung Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengingat semakin berkembangnya standar pelayanan peradilan dan ruangan penunjang juga semakin bertambah, maka dari itu perlu adanya rehabilitasi gedung agar bangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Bun bisa sesuai dengan standar *Prototipe* Mahkamah Agung RI.